

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji kebijakan pemeliharaan kesehatan anak di Jawa pada periode 1950-1980an dengan menyoroti tantangan dan upaya yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan kesehatan anak. Pada masa pascakemerdekaan, tingginya angka kematian anak di bawah lima tahun mencerminkan buruknya kondisi sosial-ekonomi, rendahnya akses terhadap layanan kesehatan, dan ketidakcukupan gizi. Kondisi tersebut mendasari argumen untuk mengetahui lebih lanjut apakah angka kematian yang terjadi disebabkan oleh kesakitan atau akibat ketidakseriusan pemerintah dalam memelihara kesehatan anak.

Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode penelitian sejarah dengan menggunakan sumber-sumber primer dan sekunder. Sumber primer yang banyak digunakan adalah koran, majalah, dan dokumen laporan sezaman. Sementara itu, sumber-sumber sekunder yang digunakan didapatkan dari buku, artikel ilmiah, prosiding, dan makalah.

Temuan dari penelitian ini adalah bahwa pemerintah era Sukarno tidak mempunyai komitmen politik untuk melaksanakan kebijakan pemeliharaan kesehatan anak, sehingga kebijakan kesehatan anak hanya sebatas konsep tanpa implementasi nyata. Peran internasional melalui bantuan WHO dan UNICEF turut membantu pengembangan fasilitas kesehatan, namun kebijakan kesehatan tetap belum mampu menjangkau seluruh kalangan. Pada era Orde Baru, pendekatan pembangunan kesehatan lebih terstruktur dengan berlanjutnya program yang telah diinisiasi di Era Sukarno. Upaya ini terbukti menurunkan angka kematian anak dan meningkatkan kesadaran gizi masyarakat, meskipun sering diwarnai pendekatan sentralistik yang kurang memperhatikan hak individu. Studi ini menyimpulkan bahwa pemeliharaan kesehatan anak membutuhkan dukungan finansial yang stabil, kerjasama lintas sektor, dan pendekatan yang lebih inklusif untuk menjamin hak kesehatan setiap anak.

Kata Kunci: *Kesehatan anak; Sukarno; Orde Baru*

ABSTRACT

This study examines child health care policy in Java during the 1950s-1980s, highlighting the challenges and efforts made by the government to improve child health. In the post-independence period, the high mortality rate of children under five years old reflected poor socio-economic conditions, low access to health services, and inadequate nutrition. These conditions underlie the argument to find out more about whether the mortality rate was caused by morbidity or due to the government's lack of seriousness in maintaining children's health.

The method used in this research is the historical research method using primary and secondary sources. Primary sources that are widely used are newspapers, magazines, and contemporaneous report documents. Meanwhile, the secondary sources used were obtained from books, scientific articles, proceedings, and papers.

The findings of this study are that the Sukarno-era government did not have the political commitment to implement child health care policies, so that child health policies were only limited to concepts without real implementation. The international role through WHO and UNICEF assistance helped develop health facilities, but health policies were still unable to reach all groups. In the New Order era, the approach to health development was more structured with the continuation of programs that had been initiated in the Sukarno Era. These efforts reduced child mortality and improved nutritional awareness, although they were often characterized by a centralized approach that paid little attention to individual rights. This study concludes that child health care requires stable financial support, cross-sectoral cooperation, and a more inclusive approach to ensure the health rights of every child.

Keywords: *Child health; Sukarno; New Order*